

**STRATEGI DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN  
KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:  
ANINDA ULFITRIA  
NIM. 210802065**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandaatangan di bawah ini:

Nama : Aninda Ulfitria  
NIM : 210802065  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Tempat Tanggal Lahir: Tapak Tuan, 05 November 2003  
Alamat : Komplek PNS Blok B No.174, Payaroh, Kec.Darul  
Imarah, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2026  
Yang Menyatakan,



*Aninda Ulfitria*  
**ANINDA ULFITRIA**  
NIM. 210802065

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**STRATEGI DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN  
KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**Aninda Ulfitria**  
**NIM: 210802065**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Dosen Pembimbing



**Muhammad Thalal, Lc., M. Si., M. Ed.**

NIP. 197810162008011011

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**STRATEGI DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KOTA  
BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH**

**SKRIPSI**

**ANINDA ULFITRIA**

**NIM. 210802065**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 April 2026  
Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed

NIP. 197810162008011011

Shafiyur Rahman, S.A.P

NIP.

Penguji I,

Penguji II,

Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si

NIP. 197802032005041001

Habibul Abrar, B.Sc., M. P. P

NIP. 199407072025051005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag

NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi karena mampu bertahan dalam menghadapi krisis serta berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Di Kota Banda Aceh, meskipun perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan tren yang cukup signifikan, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya inovasi produk, promosi yang belum optimal, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kasus untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas meliputi pelatihan berkelanjutan, pendampingan langsung di lokasi usaha, pengembangan produk, bantuan peralatan, serta dukungan promosi dan pemasaran melalui media sosial dan komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Strategi ini sejalan dengan visi “Mewujudkan Kota Banda Aceh yang Sejahtera dalam Kerangka Syariah” dan bertujuan meningkatkan kapasitas usaha, kualitas SDM, dan profesionalisme Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, efektivitas strategi dipengaruhi oleh hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan modal, kualitas SDM, akses program, dan kondisi Aceh yang rawan bencana. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengikuti program secara langsung merasakan peningkatan kapasitas, efisiensi operasional, dan kemampuan promosi, sementara pelaku yang belum mengikuti program tetap mengembangkan usaha secara mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Dinas relevan dan memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM, tetapi perlu peningkatan akses dan partisipasi seluruh pelaku agar manfaat program dapat dirasakan secara merata.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Strategi Pengembangan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Penelitian yang berjudul “Strategi Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” ini tepat waktunya. Shalawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penulisan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada penulis baik dalam bentuk saran-saran, motivasi, maupun dalam penyiapan data-data yang diperlukan.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal, amin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag Selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

3. Muazzinah, B.Sc., M.PA Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP, M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta dukungan selama penyelesaian skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang sudah mengajari dan membimbing saya selama perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada informan yang bersedia diwawancarai serta memberikan informasi dan juga data yang mendukung sehingga terselesaikan skripsi penelitian ini.
8. Kepada keluarga saya yang telah memberi kasih sayang, doa, nasehat, dukungan moral maupun materi, serta pengorbanan yang begitu besar demi keberhasilan saya. Tiada kata-kata betapa besarnya rasa terimakasih saya atas segala cinta dan perjuangan yang telah diberikan.
9. Untuk teman saya Cut Raihan Kemalasari S.AP terimakasih banyak sudah menemani saya selama ini, selalu menyemangati, dan dengan sabar membantu dalam penulisan skripsi ini. Kehadiran dan dukungannya benar-benar berarti buat saya. Semoga kebaikannya dibalas berlipat ganda.

Banda Aceh, 30 April 2026

**Aninda Ulfitria**  
**NIM. 210802065**

## DAFTAR ISI

<b>KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Penjelasan Istilah .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Teori Strategi.....	19
2.3 Konsep Strategi.....	20
2.3.1 Pengertian Strategi.....	20
2.3.2 Konsep Manajemen Strategi.....	21
2.3.3 Indikator Strategi.....	22
2.3.4 Peran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	22
2.4 UMKM.....	22
2.4.1 Pengertian UMKM.....	23
2.4.2 Tantangan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh .....	25
2.5 Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	20
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Subjek Penelitian .....	31
3.4 Sumber Data .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	37

4.1.1	Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.....	37
4.1.2	Hasil Pengumpulan Data.....	40
4.1.3	Hasil Pengolahan Data.....	49
4.1.4	Hasil Analisis Data.....	52
4.2	Pembahasan .....	55

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	60
5.2	Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	33
--------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh .....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Jepang, Australia, India, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang terlibat dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Di kawasan RCEP, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diprioritaskan di atas perusahaan besar karena kapasitasnya untuk secara signifikan meningkatkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Indonesia telah menghadapi penurunan ekonomi yang menyebabkan runtuhnya perekonomian nasional. Banyak bisnis besar di berbagai sektor, seperti perdagangan, barang, dan jasa, telah mengalami kebangkrutan. Sektor-sektor seperti perbankan, koperasi, dan tekstil mengalami stagnasi, bahkan beberapa perusahaan tutup pada tahun 1998.<sup>1</sup> Menariknya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya berhasil bertahan melewati krisis ekonomi ini tetapi juga berperan dalam meningkatkan perekonomian lokal meskipun menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh gejolak keuangan.

Dengan mempertimbangkan kekuatan model bisnis ini di saat ketidakpastian keuangan, dapat disimpulkan bahwa operasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu sektor kunci dalam dunia bisnis yang dapat bertahan bahkan berkembang, ketika menghadapi berbagai tantangan ekonomi

---

<sup>1</sup> Dani, *UMKM Bisa Gerakkan Ekonomi Indonesia, ini syaratnya*, Mei 2018. Diakses pada tanggal 4 Desember 2024 dari situs: <http://economy.okezone.com/read/2018/05/01/umkm-bisa-gerakkan-ekonomi-indonesia-ini-syaratnya>

global dan nasional. Selain itu, karena ketahanannya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menjadi model bisnis yang dapat diandalkan untuk menciptakan lapangan kerja yang efektif dan menambah lapangan kerja baru melalui munculnya berbagai bidang inovatif. Akibatnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia setelah krisis keuangan 1998, khususnya terkait dengan jumlah perusahaan, kesempatan kerja, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyebutkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini dapat dikategorikan ke dalam berbagai sektor: pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, energi, penyediaan air, perdagangan, perhotelan, jasa makanan, jasa pribadi, dan manufaktur, dengan industri kreatif sebagai salah satunya. Pertumbuhan industri kreatif sangat penting karena peran vitalnya. Pertama, sektor kreatif secara signifikan meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan menambah pendapatan lokal. Selain itu, sektor ini mendorong lingkungan bisnis yang menguntungkan yang bermanfaat bagi berbagai sektor lainnya. Lebih jauh lagi, sektor ini membantu membentuk identitas dan citra negara, mempromosikan pariwisata, simbol nasional, dan memelihara tradisi budaya dan lokal. Selanjutnya, sektor ini memanfaatkan sumber daya terbarukan seperti pengetahuan dan meningkatkan kreativitas. Sektor ini juga mendorong inovasi dan daya cipta, yang memberikan keunggulan kompetitif bagi negara. Terakhir, sektor ini dapat menciptakan

---

<sup>2</sup> Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. Vol. 6, No 1, 2017, hlm. 51. Diakses pada tanggal 04 Desember 2024

dampak positif bagi masyarakat, yang mengarah pada peningkatan standar hidup dan peningkatan harmoni sosial.<sup>3</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memegang posisi penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat vital untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyumbang lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadikannya sebagai fondasi perekonomian negara. Di Aceh, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan potensi yang cukup besar yang berasal dari kekayaan sumber daya alam, warisan budaya, dan kecerdasan masyarakat setempat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memainkan peran utama dalam mendorong perekonomian, karena mereka juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka seringkali menjadi fondasi struktur ekonomi, terutama di negara-negara yang masih berkembang. Dengan menawarkan peluang bagi pemilik usaha lokal, pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah dapat membantu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Lebih jauh lagi, bisnis-bisnis ini dapat mempromosikan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.

---

<sup>3</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh, *Pertumbuhan UMKM dan Koperasi di Banda Aceh sangat signifikan*. Oktober 2017. Diakses pada tanggal 04 Desember 2024 dari situs: <http://bandaacehkota.go.id/berita/949/pertumbuhan-umkm-dan-koperasi-di-banda-aceh-sangat-signifikan.html>

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting bagi perekonomian. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat vital untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Di antara berbagai bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri makanan menonjol sebagai salah satu yang paling terkemuka, mudah diakses, dan selalu diminati. Hal ini menjadikan penjual makanan sebagai fondasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di berbagai daerah, seperti Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya di industri makanan. Hal ini disebabkan oleh beragam tradisi kuliner, sumber daya lokal yang melimpah, dan minat konsumen yang kuat terhadap makanan konvensional maupun kontemporer. Data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di kota ini bergerak di sektor makanan, mulai dari pedagang kaki lima, warung makan, usaha catering, hingga produk makanan kemasan.

Namun, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang positif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pedagang makanan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangannya. Masalah yang umum ditemui antara lain adalah keterbatasan modal usaha, minimnya pengetahuan tentang pengelolaan bisnis dan keuangan, rendahnya inovasi produk, kualitas produk yang belum konsisten, serta kesulitan dalam memperluas pasar. Selain itu, banyak pelaku bisnis belum

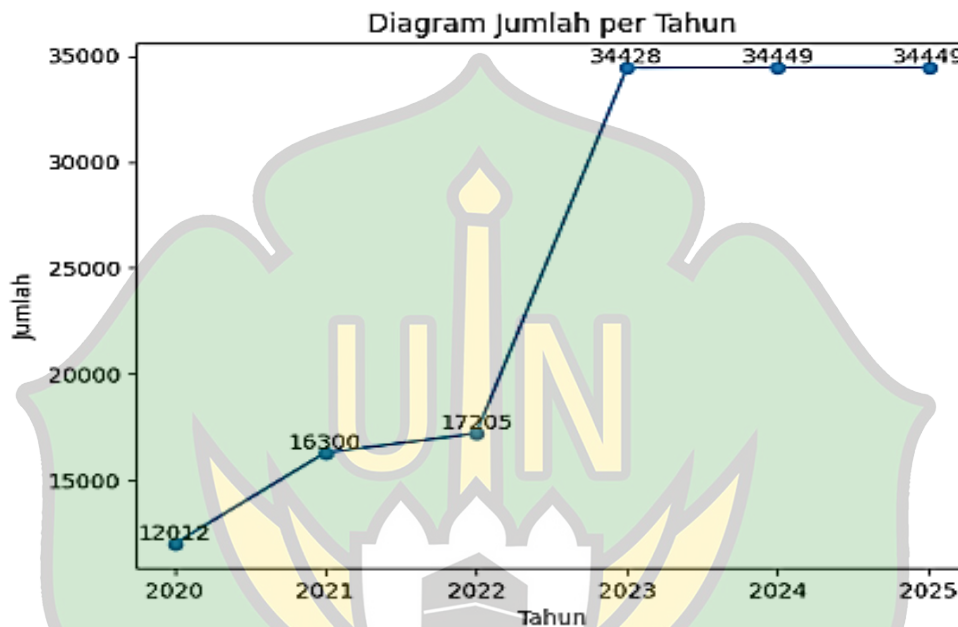
berhasil menggunakan perangkat digital secara efektif untuk memasarkan dan mengiklankan barang dagangan mereka.

Sebagai otoritas yang bertugas mendukung dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kantor Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh sangat penting dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh para penjual makanan. Inisiatif dan rencana kantor tersebut, yang meliputi pelatihan bisnis, bantuan perizinan, dukungan keuangan, dan promosi produk lokal, diharapkan dapat meningkatkan perkembangan sektor ini secara signifikan.

Kota Banda Aceh, yang dikenal sebagai pusat ekonomi Provinsi Aceh, telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setiap tahunnya. Data dari Kantor Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa jumlah total Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencapai 12.012 pada tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 16.300 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 17.205 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas usaha masyarakat yang relatif stabil dalam periode tersebut.

Perkembangan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meningkat secara drastis menjadi 34.428 unit. Peningkatan ini hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan tahun lalu, yang mengindikasikan adanya dorongan kuat baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah mengalami sedikit peningkatan menjadi 34.449 unit dan angka tersebut tetap bertahan hingga tahun 2025. Situasi ini menunjukkan bahwa ekspansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh berada pada tahap yang stabil, dengan jumlah yang cukup konstan selama dua tahun terakhir.



Sumber: Informasi Data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh tahun 2025

Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, memiliki potensi besar untuk pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan beragamnya bisnis yang ada dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inisiatif pembangunan, terdapat beberapa kendala utama seperti terbatasnya akses pendanaan dan pembiayaan yang sesuai, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya inovasi produk, dan terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kurangnya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan juga menjadi masalah lain yang menghambat kemajuannya. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya pemanfaatan teknologi digital, yang sebenarnya memiliki potensi besar

untuk memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ke skala nasional bahkan internasional.

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, yang merupakan badan pemerintah yang bertugas memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memiliki peran penting dalam mengatasi masalah-masalah ini. Dengan menerapkan berbagai inisiatif strategis seperti pemberdayaan, pelatihan, penyediaan dana usaha, dan bantuan akses pasar, dinas ini bertujuan untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kompetitif dan berkelanjutan. Namun, efektivitas strategi yang diterapkan dinas ini perlu dikaji secara mendalam, mengingat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sangat vital bagi pembangunan ekonomi Aceh pasca-konflik dan bencana tsunami.

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh terlibat dalam mendukung para pelaku usaha di Kota Banda Aceh. Beberapa fungsinya meliputi:

- 1) memberikan bantuan keuangan,
- 2) mempromosikan kolaborasi,
- 3) meningkatkan kemampuan usaha,
- 4) mendorong pertumbuhan usaha,
- 5) memberdayakan wirausahawan, dan
- 6) menawarkan program pelatihan.

Keterlibatan ini dapat membantu mengatasi tantangan yang sering muncul di Kota Banda Aceh, seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh harus mengembangkan strategi untuk memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian Kota Banda Aceh dapat berkembang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peraturan perundang-undangan ini dibuat untuk mendukung jenis usaha tersebut. Secara umum, kerangka dan isi Undang-Undang ini meliputi: (1) ketentuan umum; (2) prinsip dan tujuan; (3) prinsip dan tujuan pemberdayaan; (4) kriteria; (5) pengembangan lingkungan usaha; (6) pertumbuhan usaha; (7) pendanaan dan jaminan; (8) kemitraan; (9) koordinasi dan pengawasan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; (10) sanksi administratif dan peraturan pidana.<sup>4</sup>

Berdasarkan temuan awal di lapangan, teridentifikasi beberapa permasalahan utama yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh, yaitu: (1) keterbatasan akses permodalan, di mana banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan atau investasi usaha akibat kurangnya informasi, persyaratan yang relatif rumit, serta terbatasnya program dukungan yang terfokus; (2) rendahnya tingkat literasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), yang tercermin dari keterbatasan pemahaman dalam manajemen usaha, kemampuan inovasi, serta keterampilan teknis untuk mengembangkan usaha; (3) masih rendahnya pemanfaatan teknologi digital, sehingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum optimal dalam memanfaatkan platform digital untuk promosi, peningkatan operasional, dan perluasan jaringan pasar; (4) kurangnya evaluasi dan monitoring terhadap program pemberdayaan, di mana program yang

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

dilaksanakan belum didukung oleh sistem pengawasan dan penilaian yang memadai, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi efektivitas program serta permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan; (5) kurangnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam mengembangkan usaha; serta (6) rendahnya tingkat sertifikasi usaha yang berdampak pada keterbatasan akses pasar dan kepercayaan konsumen.

Dengan mempertimbangkan detail yang diberikan dan isu-isu terkini, penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah studi yang berjudul **“Strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sejumlah besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh terus menghadapi tantangan dalam memperoleh pendanaan atau investasi usaha karena kurangnya informasi, kriteria yang rumit, atau kelangkaan inisiatif dukungan yang terfokus.
2. Rendahnya tingkat literasi dan kompetensi SDM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Banyak usaha kecil dan menengah di Kota Banda Aceh menghadapi tantangan terkait pemahaman mereka tentang manajemen

bisnis, kemampuan berinovasi, dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan operasional mereka.

3. Kurangnya penggunaan teknologi digital. Mayoritas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk mereka, meningkatkan operasional, dan memperluas jaringan pasar mereka.
4. Kurangnya evaluasi dan monitoring program. Inisiatif yang dikelola oleh Departemen Koperasi, UKM, dan Perdagangan seringkali kurang memiliki sistem yang memadai untuk menilai dan mengawasi efektivitasnya, sehingga menyulitkan untuk menentukan tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Kurangnya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mengembangkan usaha. Menyebabkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sulit berkembang, stagnan, dan rentan terhadap guncangan ekonomi.
6. Rendahnya tingkat sertifikasi usaha dan legalitas produk masih minimnya kepemilikan izin usaha, sertifikat halal, serta sertifikat keamanan pangan, yang padahal merupakan syarat krusial untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar.
7. Terbatasnya akses pasar dan promosi. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih kesulitan dalam memperluas jangkauan distribusi produk ke luar wilayah local atau pasar tradisional.

### 1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks ini, isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam implementasi strategi pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam implementasi strategi pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif.

2. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
3. Bagi akademisi, sebagai referensi dalam kajian pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

## 1.6 Penjelasan Istilah

### 1. Strategi

Strategi dalam konteks administrasi publik merupakan pendekatan yang digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut H. George Frederickson, administrasi publik tidak hanya berfokus pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada nilai-nilai publik seperti keadilan sosial, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, strategi dalam sektor publik harus dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut agar kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.<sup>5</sup>

### 2. Pengembangan

Pengembangan adalah proses atau cara untuk mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik, lebih luas, dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengembangkan sesuatu agar menjadi lebih sempurna dan bermanfaat. Dalam perspektif manajemen,

---

<sup>5</sup> H George Frederickson et al., "The Public Administration Theory Primer Boulder" (Westview Press, 2003).

pengembangan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, serta potensi suatu organisasi atau usaha agar mampu berkembang dan bersaing secara optimal.<sup>6</sup>

### 3. UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM merujuk pada usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, perusahaan kecil, atau keluarga. Di Indonesia, UMKM menjadi pilar utama untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>



---

<sup>6</sup> KBBI, “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, n.d., <https://kbbi.web.id/pembangunan>. Diakses 28 April 2026.

<sup>7</sup> Rosyida, *Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran dan Contoh* <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mencari bahwasannya tidak ada yang sama judul skripsi terdahulu yang membahas Strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun Hasil penelitian yang sedikit ada persamaan dengan judul penelitian saya yaitu:

1. Nurul Fadzillah (2020), skripsi yang berjudul “Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM”, dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, temuan menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan sektor kreatif UMKM di Kota Banda Aceh merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk periode 2017-2022. Pendekatan pemberdayaan terdiri dari metode pendampingan yang meliputi sosialisasi, sesi pelatihan, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi peserta UMKM, dan bimbingan yang efektif. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam proses pemberdayaan, karena pelatihan dan sumber daya yang ditawarkan belum sesuai untuk optimalisasi penuh.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana strategi dinas yang terkait dalam memajukan pelaku UMKM.

---

<sup>8</sup> Nurul Fadzillah, Skripsi: “Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi UMKM” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

Sedangkan perbedaannya dari segi apa saja hambatan dalam menerapkan strategi pengembangan dari sector usaha kecil dan menengah.

2. Skripsi Desy Faradisa (2024) yang berjudul “Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Kasus Desa Proto, Kecamatan Kendungwuni, Kabupaten Pekalongan)”. Metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian potensi yang terdapat di Desa Proto cukup bagus dengan adanya lembaga pendidikan formal dan keagamaan yang pantas dijadikan basis konsumen terutama wanita dan anak-anak. Kemudian lokasi yang strategis berda di pinggiran Kendungwuni sangat mencerminkan aktivitas ekonomi yang tinggi. Adapun pemerintah Desa Proto telah berkontribusi dengan mendirikan gedung kuliner untuk menunjang pemberdayaan UMKM, kemudahan akses pembiayaan, hingga adanya badan usaha milik desa. Perbedaannya adalah dalam hal tempat penelitian dan dari segi pembangunan ekonomi daerah untuk UMKM. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama strategi dari pemerintah dalam pengembangan UMKM daerah.
3. Jurnal I ilmiah Multi Disiplin oleh Nopa Auliza (2025) dengan judul “Strategi Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam Mengembangkan Produk Pelaku UMKM di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Departemen Perdagangan dan Koperasi telah menerapkan beberapa tindakan strategis, seperti

pengembangan keterampilan, sesi inovasi produk, dukungan riset pasar, dan bantuan pemasaran. Hasil yang menonjol adalah inisiatif pelatihan dan lokakarya sangat meningkatkan kualitas menjahit dan desain di UMKM, yang menyebabkan peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap produk mereka. Selain itu, departemen tersebut memotivasi UMKM untuk menciptakan merek baru dan yang sudah ada serta menawarkan bantuan riset pasar untuk membantu pemahaman mereka tentang keinginan dan preferensi konsumen.<sup>9</sup> Kesamaan terdapat pada bagaimana organisasi pemerintah mendekati penciptaan produk UMKM. Perbedaannya terletak pada area tempat penelitian dilakukan serta metode dan tantangan yang dihadapi oleh badan pemerintah dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah.

4. Dewi Putri Cahyaningrum (2023) dengan judul “Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Gembong Asih di Surabaya”. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa Pasar Gembong Asih sangat membutuhkan revitalisasi. Inisiatif ini diharapkan dapat membangkitkan kembali dedikasi para pedagang pasar, memungkinkan mereka untuk meningkatkan penjualan dan mengatur keuangan mereka. Pasar perlu dikembalikan ke karakter dasarnya, mengubahnya menjadi tempat untuk mendorong produktivitas masyarakat, yang telah semakin menurun akibat pengaruh globalisasi. Perbedaan

---

<sup>9</sup> Nopa Auliza, “Strategi Dinas Perdagangan dan Koperasi dalam Mengembangkan Produk Pelaku UMKM di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin: Universitas Malikussaleh, Vol. 03, No. 01, 2025, hal. 261-267.

ditemukan pada lokasi penelitian dan deskripsi peran Departemen Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam mendukung pedagang kaki lima. Aspek umum berfokus pada upaya untuk mempromosikan UKM.

5. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK oleh Jaelani (2022) dengan judul “Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Era Digital”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh mencakup metode pengembangan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, penyediaan sumber daya untuk UMKM, dan bimbingan. Namun, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut belum mencapai potensi maksimalnya karena sesi pendampingan digitalisasi yang terbatas dan tidak teratur. Akibatnya, pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh belum sepenuhnya efektif dan selaras.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, dan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengeksplorasi pendekatan yang diambil oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam mempromosikan sektor Usaha

---

<sup>10</sup> Muhammad Jaelani, Strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Digital, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USK, 2022, Vol. 7, No. 4.

Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, peneliti juga meneliti tantangan yang dihadapi oleh dinas tersebut dalam melaksanakan strateginya untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kebaharuan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih komprehensif dalam menganalisis strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menitikberatkan pada aspek pemberdayaan, peningkatan industri kreatif, atau pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penelitian ini tidak hanya mengkaji strategi yang diterapkan, tetapi juga secara mendalam mengidentifikasi hambatan dalam implementasi strategi tersebut.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan pada konteks permasalahan yang lebih aktual, yaitu dengan menyoroti isu-isu seperti keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya literasi dan kompetensi sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi digital, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi program yang dijalankan oleh dinas terkait. Aspek-aspek ini belum dikaji secara terintegrasi dalam penelitian sebelumnya.

Kebaharuan lainnya terletak pada lokasi dan kondisi empiris penelitian, yaitu di Kota Banda Aceh dengan dinamika pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca peningkatan signifikan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada periode 2023–2025. Hal ini memberikan perspektif baru dalam melihat efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perkembangan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah di era modern. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam merumuskan strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pelaku usaha.

## 2.2 Teori Strategi

Teori strategi merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana suatu organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tidak hanya dipahami sebagai rencana, tetapi juga sebagai serangkaian tindakan yang terarah dan sistematis dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan.

Menurut Fred R. David, strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi melalui serangkaian keputusan dan tindakan yang terintegrasi. Strategi mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.<sup>11</sup> Selanjutnya, menurut Husein Umar, strategi merupakan proses penentuan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal agar mampu bersaing dan mencapai keunggulan.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana terpadu yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan melalui proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan

---

<sup>11</sup> Fred R. David, Forest R. David, dan Meredith E. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, Edisi 17 (Harlow: Pearson Education, 2023), hlm. 35

<sup>12</sup> Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 16.

memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

## 2.3 Konsep Strategi

### 2.3.1 Pengertian Strategi

Strategi adalah pendekatan yang kohesif, menyeluruh, dan terkoordinasi yang menghubungkan kekuatan perusahaan dengan tantangan yang dihadirkan oleh lingkungannya dan bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan utama perusahaan tercapai melalui implementasi yang efektif oleh organisasi. Strategi berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran). Namun demikian, strategi lebih dari sekadar rencana. Strategi adalah rencana yang kohesif: strategi menghubungkan setiap segmen organisasi. Strategi bersifat menyeluruh: strategi mencakup setiap aspek penting dari bisnis. Strategi terkoordinasi: semua elemen rencana bekerja bersama secara mulus dan selaras.<sup>13</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh Crown Dirgantoro (2001), istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “kepemimpinan dalam militer”. Implikasi ini digunakan dalam pertempuran dan kemudian berubah menjadi manajemen angkatan bersenjata, yang meliputi pengelolaan prajurit, pengorganisasian kelompok pasukan yang besar, koordinasi perintah tertentu, dan kegiatan serupa.<sup>14</sup>

Sementara itu, seperti yang dicatat oleh Husein Umar (2002), strategi melibatkan penentuan arah untuk “manajemen”, khususnya menyangkut individu, bersama dengan sumber daya dalam perusahaan dan mengidentifikasi situasi yang menawarkan keuntungan terbesar untuk berhasil dalam persaingan pasar. Dengan kata lain, makna strategi mencakup dua bagian, yaitu: niat masa depan dan

---

<sup>13</sup> Hartono, Jogianto. *Strategi Penelitian Bisnis*. (BPFE: Yogyakarta. 2018), hlm. 29.

<sup>14</sup> Hartono, Jogianto. *Strategi Penelitian Bisnis*. (BPFE: Yogyakarta. 2018), hlm. 29.

keunggulan kompetitif.<sup>15</sup>

### 2.3.2 Konsep Manajemen Strategi

Sebagaimana dikemukakan oleh Fred R. David (2011), “manajemen strategis adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa manajemen strategis merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengarahkan berbagai kegiatan agar tujuan dapat tercapai secara efektif.<sup>16</sup>

Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, manajemen strategis (*strategic management*) adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.<sup>17</sup>

Manajemen strategis melibatkan penyusunan dan pengawasan rencana yang mempertimbangkan berbagai elemen untuk memastikan bahwa dampak rencana tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi dari waktu ke waktu. Bidang penelitian utama dalam manajemen strategis adalah menganalisis bagaimana penerapan ide-ide strategis memengaruhi perusahaan secara berkelanjutan, khususnya terkait dengan keuntungan yang konsisten. Keuntungan yang konsisten dipengaruhi oleh penjualan yang stabil dan ekspansi yang berkelanjutan. Siagian (2000) mendeskripsikan manajemen strategis sebagai rangkaian keputusan dan aktivitas penting yang dilakukan oleh manajemen

<sup>15</sup> Hartono, Jogiarto. *Strategi Penelitian Bisnis*. (BPFE: Yogyakarta. 2018), hlm. 29.

<sup>16</sup> Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, 18th ed. (Harlow: Pearson Education, 2023), hlm. 5.

<sup>17</sup> Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, *Strategic Management and Business Policy*, 16th Edition, New York: Pearson, 2023, hlm. 6–7.

puncak dan dilaksanakan oleh berbagai tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>18</sup>

### 2.3.3 Indikator Strategi

Strategi berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengawasi kekuasaan dan sumber daya saat ini melalui entitas publik (pemerintah) yang berfokus pada kebaikan bersama. Mengikuti definisi ini, Geoff Mulgan mengidentifikasi lima (5) indikator utama strategi pemerintah: Tujuan, Lingkungan, Arah, Tindakan, dan Pembelajaran. Ketika para peneliti mempertimbangkan kelima elemen yang dijelaskan oleh Mulgan ini, menjadi jelas bahwa semuanya memiliki aspek politik yang signifikan, terutama ditujukan untuk merancang kebijakan atau memajukan tujuan pemerintah. Strategi yang diuraikan oleh Geoff Mulgan secara khusus merupakan strategi publik, yang membedakannya dari strategi korporat. Menurut teori Mulgan dan komponen yang disebutkan, ia menekankan dua sumber daya penting yang dibutuhkan baik untuk fase desain maupun fase eksekusi: kekuasaan dan pengetahuan.<sup>19</sup>

### 2.3.4 Peran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Aceh mempunyai tugas sebagai berikut seperti dalam pasal 6:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> David Sukardi Kodrat, *Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 13.

<sup>19</sup> Mulgan, G, *The Art Of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good*. Inggris: Oxford University Press, 2009. Hal 19.

<sup>20</sup> Peraturan Gubernur Aceh nomor 120 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja dinas koperasi, UKM Aceh.

1. Melaksanakan tugas-tugas administratif;
2. Membuat rencana kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
3. Mengembangkan dan merancang kebijakan teknis terkait koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. Meningkatkan kolaborasi dalam perencanaan dan penyusunan program antar instansi terkait koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5. Mendukung dan meningkatkan koperasi serta usaha kecil dan menengah;
6. Melakukan pengawasan operasional terhadap koperasi dan usaha kecil dan menengah;
7. Mengatur upaya pemasaran, menyebarluaskan informasi, dan menyelenggarakan pameran untuk kemajuan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
8. Mengarahkan Unit Pelaksana Teknis (UPTD); dan
9. Memfasilitasi kerja sama dengan instansi dan/atau organisasi terkait lainnya di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

## **2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah unit usaha mandiri yang dikelola oleh individu atau organisasi di berbagai bidang ekonomi. Pada kenyataannya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah umumnya terkait dengan bisnis yang memiliki sumber daya keuangan terbatas. Namun tidak sedikit berawal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini pun

cukup bagus dari tahun ke tahun. Pemerintah sangat fokus dan berkomitmen pada sektor ini. Hal ini karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan fondasi pasar tenaga kerja. Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting. Hal ini karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah unggul dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan, dan mampu hidup berdampingan dengan perusahaan yang lebih besar.<sup>21</sup>

Di Indonesia, peraturan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 Undang-Undang tersebut.<sup>22</sup>

- a. Usaha Mikro mengacu pada usaha kecil yang dimiliki oleh satu orang atau usaha perseorangan dan memenuhi definisi Usaha Mikro sebagaimana diuraikan dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi otonom yang dijalankan oleh seseorang atau bisnis yang tidak berafiliasi dengan atau merupakan divisi dari perusahaan besar yang dikendalikan oleh, dimiliki oleh, atau secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perusahaan menengah atau besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi independen yang dioperasikan

---

<sup>21</sup> Tukus Tambunan, *Usaha Mikro kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 11.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1.

oleh seseorang atau bisnis yang bukan merupakan anak perusahaan atau divisi dari perusahaan yang dimiliki, diarahkan, atau terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau besar dan memiliki aset bersih atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini.

#### **2.4.2 Tantangan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh**

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, baik dari aspek permodalan, sumber daya manusia, teknologi, maupun kelembagaan. Adapun tantangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Keterbatasan Akses Permodalan**

Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya pedagang makanan skala kecil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan agunan, tidak lengkapnya dokumen usaha, serta rendahnya literasi keuangan.<sup>23</sup>

##### **2. Kurangnya Pengetahuan Standar Higienitas dan Keamanan Pangan**

Sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum memahami pentingnya standar kebersihan, keamanan pangan, serta pengemasan produk yang sesuai standar, sehingga berdampak pada rendahnya daya

---

<sup>23</sup> Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh. (2023). *Laporan Program Pemberdayaan UMKM Sektor Makanan*.

saing dan kepercayaan konsumen.<sup>24</sup>

### 3. Rendahnya Inovasi Produk dan Diversifikasi Usaha

Produk yang dihasilkan cenderung monoton dan kurang inovatif serta belum sepenuhnya mengikuti perkembangan tren pasar, sehingga sulit bersaing dengan produk kuliner modern maupun produk dari luar daerah.<sup>25</sup>

### 4. Terbatasnya Akses Pasar dan Promosi Produk

Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih mengandalkan penjualan secara konvensional di warung, gerobak, atau pasar tradisional, dan belum optimal dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar.<sup>26</sup>

### 5. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi pemesanan makanan, dan sistem kasir digital masih sangat terbatas, padahal teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha.<sup>27</sup>

### 6. Kurangnya Pendampingan Usaha yang Berkelanjutan

Program pelatihan yang diberikan pemerintah umumnya masih bersifat jangka pendek dan belum diikuti dengan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga implementasi di lapangan belum optimal.<sup>28</sup>

### 7. Ketergantungan pada Lokasi Strategis dan Momen Tertentu

---

<sup>24</sup> BPOM Aceh. (2022). *Laporan Pengawasan Makanan Siap Saji di Wilayah Banda Aceh*.

<sup>25</sup> Rahmawati, D. (2021). "Inovasi Produk Kuliner Tradisional sebagai Strategi Daya Saing UMKM", *Jurnal Kuliner Nusantara*, Vol. 4, No. 2, hlm. 77–86.

<sup>26</sup> BPS Kota Banda Aceh. (2022). *Data UMKM menurut Sektor Usaha*.

<sup>27</sup> Fadhlan, M. & Zulfikar, R. (2021). "Digitalisasi UMKM Kuliner Pasca Pandemi di Banda Aceh", *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, hlm. 56–67.

<sup>28</sup> Hidayati, S. (2022). "Efektivitas Pelatihan UMKM oleh Dinas Terkait", *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, hlm. 33–45.

Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat bergantung pada lokasi usaha yang ramai atau event tertentu, sehingga pendapatan menjadi tidak stabil ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi.

#### 8. Terbatasnya Sarana dan Infrastruktur Produksi

Sebagian pelaku usaha masih menggunakan peralatan sederhana dan belum memiliki fasilitas produksi yang memadai, sehingga berdampak pada keterbatasan kapasitas dan kualitas produk.<sup>29</sup>

#### 9. Kurangnya Sertifikasi Usaha dan Legalitas Produk

Masih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum memiliki izin usaha, sertifikat halal, maupun sertifikasi keamanan pangan, yang berdampak pada terbatasnya akses pasar dan rendahnya kepercayaan konsumen.<sup>30</sup>

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang telah disebutkan di atas, sangat penting untuk menerapkan strategi yang efektif bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh, termasuk.<sup>31</sup>

1. Membangun sistem pendukung: Menciptakan sistem pendukung, termasuk sistem informasi, sistem pendukung logistik, dan sistem pendukung hukum, dapat membantu usaha kecil dan menengah di Kota Banda Aceh.
2. Kemajuan masyarakat: Kemajuan di bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah di Kota Banda Aceh.

---

<sup>29</sup> Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. (2022). *Data Inspeksi Sanitasi Produksi Makanan UMKM*

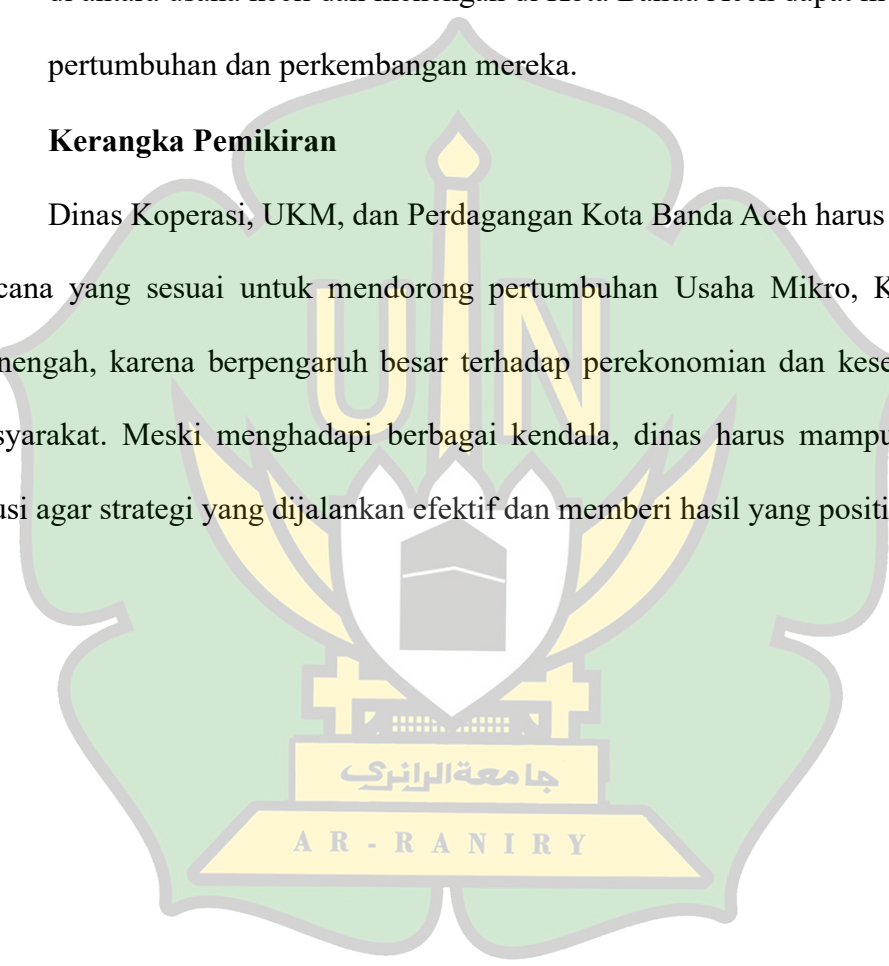
<sup>30</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Banda Aceh. (2023). *Rekap Izin Usaha Mikro dan Sertifikasi Halal Pedagang Makanan*.

<sup>31</sup> Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 2019. Hal. 88.

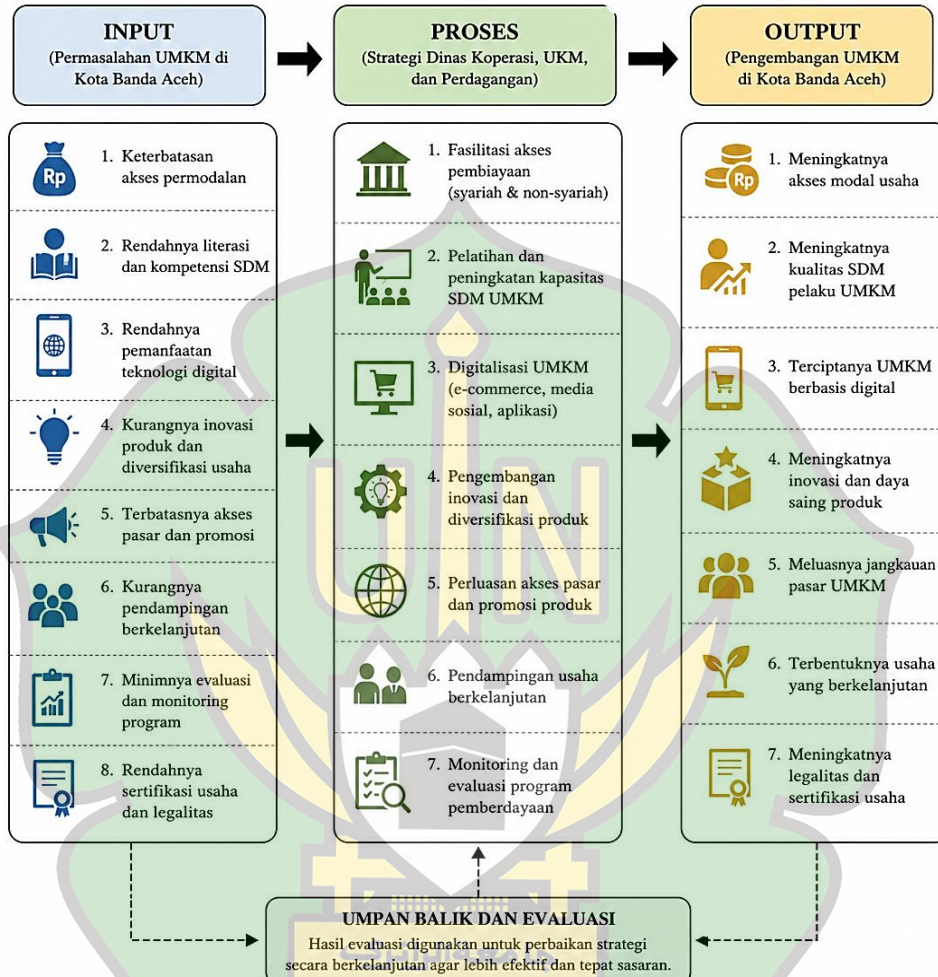
3. Pengembangan infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, ruang kantor, dan layanan komunikasi, dapat membantu usaha kecil dan menengah di Kota Banda Aceh.
4. Mendorong kolaborasi: Mempromosikan kerja sama dan kemajuan sosial di antara usaha kecil dan menengah di Kota Banda Aceh dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh harus membuat rencana yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, karena berpengaruh besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, dinas harus mampu mencari solusi agar strategi yang dijalankan efektif dan memberi hasil yang positif.



**GAMBAR 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**  
**STRATEGI DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN**  
**DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA BANDA ACEH**



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang secara khusus berfokus pada pendekatan yang diambil oleh Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan sektor Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dirujuk oleh Moleong, penelitian kualitatif dicirikan sebagai metode yang menghasilkan informasi deskriptif yang disajikan melalui komunikasi tertulis atau verbal dari individu dan tindakan yang tercatat dari peristiwa yang terjadi.<sup>32</sup> Moleong juga menyebutkan bahwa penelitian deskriptif berfokus pada informasi yang disajikan sebagai kata-kata dan gambar, bukan sebagai data numerik, karena menggunakan teknik kualitatif.<sup>33</sup>

Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada secara jelas.

Studi kualitatif ini memiliki beberapa ciri, seperti: investigasi dalam konteks dunia nyata, melibatkan orang sebagai alat (instrumen), menggunakan teknik kualitatif, menganalisis data secara induktif (analisis kualitatif terjadi bersamaan dengan pengumpulan data), penelitian deskriptif (informasi

---

<sup>32</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. I*, (Agustus: 2018), hlm. 4.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, tindakan), berfokus pada prosedur daripada hasil, dan bersifat inklusif, dengan signifikansi sebagai fokus utama penelitian.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh tentang Strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat studi dilakukan untuk menemukan jawaban atas isu-isu yang sedang diteliti.<sup>34</sup> Pertimbangan tempat penelitian sangat diperlukan untuk menemukan peluang mendapatkannya informasi yang dibutuhkan. Di dalam penelitian ini dengan judul “Strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Peneliti memilih tempat penelitian di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Jl. Jln. Soekarno Hatta KM 2 No. 1, Mibo, Banda Raya, Banda Aceh, Kode Pos 23231. Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono, fokus penelitian melibatkan karakteristik atau signifikansi individu, item, atau tindakan yang mengandung variabel spesifik yang

---

<sup>34</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program BK di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 53.

diidentifikasi untuk diperiksa, yang mengarah pada temuan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, yang peneliti jadikan sebagai subjek penelitian adalah Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berjumlah 4 orang.

### 3.4 Sumber Data

1. Data primer merupakan kumpulan data atau serangkaian bentuk informasi yang diperoleh secara langsung melalui metode, seperti observasi, survei, dan jenis wawancara pribadi.
2. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu kumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek peneliti yang diperoleh melalui sebuah website, majalah, jurnal, buku, internet, atau referensi yang sedang diteliti.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data utama adalah pernyataan dan tindakan lisan, sedangkan dokumen dan informasi tambahan hanya digunakan sebagai bukti pelengkap. Sumber data untuk penelitian ini selaras dengan tujuan penelitian yang spesifik. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Informan Kepala bidang UMKM Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, beserta empat peserta UMKM.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 32.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 137.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Kategori Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang UMKM	1
2	Pelaku UMKM	4
	Jumlah	5

- b. Temuan dari pengamatan peneliti
- c. Dokumen berisi data layanan yang mencakup deskripsi keseluruhan area layanan, tujuan dan sasaran, profil, lokasi penelitian, gambar, dan berbagai komentar.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

#### 1. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban lisan satu arah, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan jawaban berasal dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terbuka. Formulir wawancara yang berisi berbagai pertanyaan dari peneliti diberikan kepada Kepala Bidang Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, serta kepada para pemangku kepentingan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh Kantor Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan strategi pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### 2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses penelitian yang mengumpulkan informasi terkait suatu isu penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan. Peneliti ditempatkan di lokasi untuk mengumpulkan bukti yang kredibel untuk laporan yang akan mereka tulis. Observasi berfungsi sebagai cara pengumpulan data di mana peneliti mendokumentasikan detail sebagaimana yang mereka lihat secara langsung selama penelitian. Dalam bentuk observasi ini, peneliti menerapkan teknik observasi non-partisipan, yang berarti mereka hanya mengamati keadaan subjek tanpa ikut serta dalam aktivitas tersebut.

Metode pengumpulan informasi ini melibatkan pengamatan terhadap peristiwa aktual dan nyata. Observasi tersebut harus memberikan data yang sesuai atau berkaitan dengan subjek penelitian. Studi ini berfokus pada pendekatan yang diambil oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tujuan observasi ini adalah untuk melakukan observasi dan mengumpulkan informasi mengenai taktik yang digunakan oleh Koperasi, UKM, serta Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh dalam memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan tantangan yang dihadapi oleh Koperasi, UKM, serta Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan rencana pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>37</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah arsip peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dokumentasi dapat berupa tulisan, ilustrasi, atau karya penting yang dibuat

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

oleh orang-orang. Materi yang akan disertakan oleh peneliti terdiri dari laporan, gambar atau foto kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan berbagai dokumen pendukung tambahan.<sup>38</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan melalui kerangka analisis Miles dan Huberman, yang bersifat menarik dan berlanjut hingga selesai. Tugas-tugas yang terlibat dalam analisis data terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, dan penyajian data, yang semuanya terjadi selama dan setelah proses pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>39</sup>

Analisis data penelitian yang dilakukan maksudnya untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam implementasi strategi pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun langkah-langkah analisis adalah:

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 326.

<sup>39</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 210.

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pengurangan data melibatkan langkah-langkah memilih, memfokuskan pada penyederhanaan, meringkas, dan memodifikasi data “mentah” yang berasal dari catatan berkelanjutan selama upaya penelitian kualitatif. Dalam studi ini, pada fase pengurangan data, peneliti memilih data yang dikumpulkan di lapangan yang dapat menjawab pernyataan masalah saat ini.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data diringkas, fase selanjutnya adalah menampilkannya. Dalam studi kualitatif, data dapat disajikan sebagai ringkasan singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan banyak lagi. Cara umum untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif.

### 3. *Conclusion/drawing/verification*

Tahap selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan dan mengkonfirmasi. Kesimpulan yang dibuat dalam studi kualitatif dapat menjawab pertanyaan awal yang diajukan, tetapi mungkin juga tidak, seperti yang disebutkan sebelumnya, karena pertanyaan dan formulasinya dalam penelitian kualitatif masih bersifat awal dan akan berubah seiring berjalannya studi di lapangan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 334.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan

###### Kota Banda Aceh



Gambar 4.1 Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, yang memiliki peran strategis dalam pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kota Banda Aceh. Dinas ini bertanggung jawab dalam merumuskan program, strategi, dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk penyediaan pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan dukungan pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah binaan.

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh berlokasi di pusat pemerintahan kota, sehingga memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah untuk mengakses informasi dan layanan pembinaan. Program-program yang dijalankan oleh Dinas dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain pelatihan di kantor Dinas, pendampingan langsung di lokasi usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta fasilitasi permodalan dan promosi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai secara langsung implementasi strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, baik dari sisi Dinas sebagai penyelenggara program maupun dari sisi pelaku UMKM sebagai penerima manfaat.

Penelitian ini menyoroti pentingnya inisiatif pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kaitannya dengan visi dan misi Kota Banda Aceh. Visi kota ini adalah: “Mewujudkan Kota Banda Aceh yang Sejahtera dalam Kerangka Syariah.” Dalam visi ini, dua istilah kunci menonjol: “Sejahtera” dan “Bingkai Syariah.”

1. Sejahtera (Ekonomi Gemilang) diartikan sebagai kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama: agama, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini diarahkan menuju kejayaan dan kemasyhuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Bingkai Syariah berarti seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan mendasarkan diri pada Syariat Islam.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah,

syariah, dan akhlak.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam konteks penelitian ini, program dan strategi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pilar ekonomi dari visi “Sejahtera” Kota Banda Aceh. Program Dinas diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, baik dari sisi produksi, manajemen, maupun pemasaran, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang selaras dengan visi dan misi kota.

Selain itu, lokasi penelitian mencakup beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, baik yang binaan Dinas seperti Wirda Cake, maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mandiri/non-binaan seperti Rumah Bitata Nasi Minyak dan Nasi Soto, Pabrik Tahu Ateuk Deah Tanoh, dan Tukang Taylor. Pemilihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan secara *purposive* agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi, implementasi, dukungan stakeholder, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak program pengembangan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh. Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat perbedaan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendapatkan pembinaan Dinas dan yang berjalan mandiri, sehingga evaluasi program dapat dilakukan secara objektif.

#### **4.1.2 Hasil Pengumpulan Data**

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen mengenai inisiatif Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Wawancara dilakukan dengan beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk yang didukung oleh Kantor tersebut dan yang tidak, untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tantangan yang dihadapi, dan dampak program-program tersebut.

#### **1. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**

##### **a. Tujuan (*Purpose*)**

Ringkasan hasil wawancara: Tujuan strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor usaha kecil serta peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar lebih mandiri, profesional, dan berdaya saing. Tujuan ini juga diselaraskan dengan visi pembangunan Kota Banda Aceh.

Kutipan wawancara:

“Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh memiliki visi sejalan dengan pembangunan Kota Banda Aceh, yaitu mewujudkan Banda Aceh yang Sejahtera dalam kerangka syariah, strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”<sup>41</sup>

Selain itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga merasakan dampaknya:

“Strategi yang diterapkan memungkinkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan strategi promosi membantu usaha menjadi lebih profesional, terstruktur, dan mampu bersaing.”<sup>42</sup>

Analisis: tujuan strategi telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha.

#### b. Lingkungan (*Environment*)

Ringkasan hasil wawancara: Lingkungan pelaksanaan strategi dipengaruhi oleh faktor internal berupa keterbatasan modal dan kualitas SDM, serta faktor eksternal seperti kondisi daerah yang rawan bencana. Selain itu, terdapat kendala dalam distribusi informasi program kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kutipan wawancara:

“Hambatan internal termasuk keterbatasan modal Usaha Mikro, Kecil,

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tanggal 09 Januari 2026.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Elfida yang mempunyai usaha Wirda Cake Tanggal 15 Januari 2026.

dan Menengah dan kualitas SDM yang belum optimal. Hambatan eksternal berupa kondisi Aceh yang rawan bencana.”<sup>43</sup>

Pelaku UMKM juga menyampaikan:

“Mengetahui secara umum tentang program tetapi belum pernah mendapatkan informasi yang jelas atau mengikuti program tersebut secara langsung.”<sup>44</sup> “Mengetahui secara umum namun usaha ini belum pernah mendapatkan atau mengikuti program secara langsung.”<sup>45</sup>

Analisis: hal ini menunjukkan bahwa lingkungan strategis masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemerataan akses informasi dan penguatan kapasitas pelaku usaha.

### c. Arah (*Direction*)

Ringkasan hasil wawancara: Arah strategi difokuskan pada pelaksanaan program yang terstruktur seperti pelatihan, pendampingan, pengembangan produk, dan kerja sama mitra untuk meningkatkan kualitas serta daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kutipan wawancara:

“Program kerja Dinas mencakup pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan, pendampingan usaha, pengembangan produk, serta kerja sama dengan berbagai mitra.”<sup>46</sup> “Dinas mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memenuhi standar kualitas produk agar usaha lebih profesional.”<sup>47</sup>

Analisis: arah kebijakan sudah jelas dan terstruktur, dengan fokus pada

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tanggal 09 Januari 2026.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan pelaku UMKM pabrik tahu Ateuk Deah Tanoh Tanggal 21 Januari 2026.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan pemilik UMKM Rumah Bitata Nasi Minyak dan Nasi Soto Tanggal 27 Januari 2026.

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tanggal 09 Januari 2026.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan pelaku UMKM pabrik tahu Ateuk Deah Tanoh Tanggal 21 Januari 2026.

peningkatan kualitas usaha dan perluasan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

d. Tindakan (*Action*)

Ringkasan hasil wawancara: Implementasi strategi dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, dan dukungan pemasaran. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata ke seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kutipan wawancara:

“Strategi yang diterapkan meliputi pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, dan dukungan pemasaran.”<sup>48</sup> “Pelatihan manajemen usaha membantu pengaturan operasional, bantuan peralatan seperti mesin jahit tambahan mempercepat proses produksi.”<sup>49</sup> “Semua pengembangan usaha dilakukan secara mandiri, tanpa mendapatkan manfaat langsung dari dinas.”<sup>50</sup>

Analisis: meskipun program sudah berjalan, pemerataan pelaksanaan masih menjadi kendala utama dalam implementasi strategi.

e. Pembelajaran (*Learning*)

Ringkasan hasil wawancara: Evaluasi strategi dilakukan melalui monitoring, laporan program, dan penilaian kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pendampingan lanjutan dan pemerataan akses program.

Kutipan wawancara:

“Mekanisme evaluasi dilakukan melalui monitoring kegiatan, laporan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Elfida yang mempunyai usaha Wirda Cake Tanggal 15 Januari 2026.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan pemilik UMKM Tukang Taylor Tanggal 27 Januari 2026.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan pelaku UMKM pabrik tahu Ateuk Deah Tanoh Tanggal 21 Januari 2026.

pelaksanaan program, serta penilaian terhadap perkembangan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”<sup>51</sup> “Kurangnya pendampingan lanjutan setelah program selesai membuat beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membutuhkan waktu lebih lama untuk menerapkan ilmu.”<sup>52</sup> “Dukungan formal dari Dinas belum pernah diterima.”<sup>53</sup>

Analisis: Pembelajaran strategi sudah berjalan, tetapi masih perlu penguatan pada aspek tindak lanjut, pendampingan berkelanjutan, dan pemerataan program.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh telah mencakup lima elemen penting (*purpose, environment, direction, action, learning*). Namun, tantangan utama masih terletak pada pemerataan akses program, pendampingan berkelanjutan, serta optimalisasi distribusi informasi kepada seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **2. Hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam implementasi strategi pengembangan sektor usaha kecil dan menengah.**

### **a. Perspektif Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh**

Ringkasan hasil wawancara: Dinas menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kualitas SDM yang belum optimal, serta sistem pembiayaan yang kurang fleksibel. Hambatan eksternal juga muncul dari kondisi wilayah yang rawan bencana. Untuk

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tanggal 09 Januari 2026.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Elfida yang mempunyai usaha Wirda Cake Tanggal 15 Januari 2026.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan pemilik UMKM Tukang Taylor Tanggal 27 Januari 2026.

mengatasinya, dilakukan sinergi dengan stakeholder, pendampingan, serta evaluasi berkala melalui monitoring dan laporan program.

Kutipan wawancara:

“Hambatan internal termasuk keterbatasan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kualitas SDM yang belum optimal. Hambatan eksternal berupa kondisi Aceh yang rawan bencana juga memengaruhi keberlangsungan usaha”<sup>54</sup>

Analisis: hambatan yang dihadapi Dinas menunjukkan bahwa implementasi strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis program, tetapi juga oleh kondisi struktural yang lebih luas. Keterbatasan modal dan SDM mengindikasikan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih berada pada tahap pengembangan dasar sehingga membutuhkan intervensi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, kondisi geografis dan risiko bencana menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan, sehingga menuntut strategi yang adaptif dan responsif. Upaya yang dilakukan Dinas melalui sinergi, pendampingan, dan evaluasi menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, namun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan pemerataan jangkauan program.

b. Perspektif Ibu Elfida (Wirda Cake)

Ringkasan hasil wawancara: Hambatan utama meliputi keterbatasan modal, tenaga kerja, kurangnya pendampingan lanjutan, serta perbedaan

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tanggal 09 Januari 2026.

kemampuan teknis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memengaruhi efektivitas program.

Kutipan wawancara:

“Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan modal dan tenaga kerja pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kurangnya pendampingan lanjutan setelah program selesai.”<sup>55</sup>

Analisis: hambatan yang dialami pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berkaitan dengan aspek pendampingan dan kapasitas individu pelaku usaha. Keterbatasan modal dan tenaga kerja menunjukkan masih lemahnya struktur usaha mikro, sementara kurangnya pendampingan lanjutan menyebabkan transfer pengetahuan dari program tidak berjalan optimal. Selain itu, perbedaan kemampuan manajerial antar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu dalam menerima dan mengimplementasikan materi pelatihan. Dengan demikian, hambatan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

c. Perspektif Pabrik Tahu Ateuk Deah Tanoh

Ringkasan hasil wawancara: Hambatan utama adalah tidak adanya akses langsung ke program Dinas, sehingga pengembangan usaha dilakukan secara mandiri. Hambatan lain meliputi keterbatasan modal, SDM, dan pemasaran.

Kutipan wawancara:

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Elfida yang mempunyai usaha Wirda Cake Tanggal 15 Januari 2026.

“Semua usaha pengembangan harus dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan Dinas. Hambatan internal meliputi keterbatasan modal untuk menambah mesin produksi”<sup>56</sup>

Analisis: adanya kesenjangan dalam distribusi program pemerintah, di mana tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh akses yang sama terhadap bantuan dan pendampingan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha harus mengandalkan kemampuan sendiri dalam mengembangkan usaha, yang pada akhirnya membatasi percepatan pertumbuhan usaha. Keterbatasan modal dan SDM semakin memperkuat tantangan tersebut, terutama dalam hal peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi masih belum merata dan membutuhkan peningkatan dalam aspek jangkauan serta inklusivitas program.

#### d. Perspektif Rumah Bitata Nasi Minyak dan Nasi Soto

Ringkasan hasil wawancara: hambatan utama adalah tidak adanya akses program Dinas, sehingga usaha berkembang secara mandiri. Hambatan lain meliputi keterbatasan modal, tenaga kerja, dan pemasaran.

Kutipan wawancara:

“Dukungan formal dari Dinas maupun pemerintah belum pernah diterima. Hambatan internal yang dihadapi meliputi keterbatasan modal dan akses pemasaran yang masih terbatas.”<sup>57</sup>

Analisis: hambatan yang serupa dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan pelaku UMKM pabrik tahu Ateuk Deah Tanoh Tanggal 21 Januari 2026.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan pemilik UMKM Rumah Bitata Nasi Minyak dan Nasi Soto Tanggal 27 Januari 2026.

Menengah sebelumnya, yaitu ketidakterjangkauan program pemerintah serta keterbatasan sumber daya internal usaha. Ketergantungan pada inisiatif sendiri dalam pengembangan usaha menunjukkan bahwa peran pemerintah belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kondisi ini berdampak pada lambatnya perkembangan usaha karena keterbatasan akses terhadap pelatihan, modal, dan jaringan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemerataan program agar seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memperoleh manfaat yang sama.

e. Perspektif Tukang Taylor

Ringkasan hasil wawancara: hambatan meliputi keterbatasan SDM, waktu pelatihan karena padatnya pesanan, serta adaptasi pemasaran digital. Namun terdapat dukungan dari Dinas berupa pelatihan, pendampingan, dan peralatan.

Kutipan wawancara:

“Tukang Taylor menghadapi keterbatasan SDM. Adaptasi terhadap pemasaran digital awalnya memerlukan waktu.”<sup>58</sup>

Analisis: pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memperoleh akses terhadap program Dinas, tetap terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama pada aspek kapasitas internal usaha. Keterbatasan SDM dan waktu menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menghadapi tekanan operasional yang tinggi sehingga sulit mengikuti

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan pemilik UMKM Tukang Taylor Tanggal 27 Januari 2026.

seluruh program secara optimal. Selain itu, proses adaptasi terhadap pemasaran digital menunjukkan bahwa transformasi usaha memerlukan waktu dan pembiasaan. Namun demikian, adanya dukungan dari Dinas melalui pelatihan dan bantuan peralatan memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha.

Secara keseluruhan, hambatan dalam implementasi strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Banda Aceh bersifat kompleks dan saling berkaitan antara faktor internal dan eksternal. Hambatan internal seperti keterbatasan modal, SDM, dan manajemen usaha menjadi faktor utama yang memperlambat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sementara hambatan eksternal seperti belum meratanya akses program dan kondisi wilayah memperkuat tantangan tersebut. Di sisi lain, meskipun sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah merasakan manfaat program, masih terdapat kesenjangan implementasi yang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi dalam bentuk pemerataan program, peningkatan pendampingan berkelanjutan, serta penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi riil pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **4.1.3 Hasil Pengolahan Data**

Berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, pengolahan data untuk penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh melaksanakan strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui berbagai program yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan bisnis, standar produk, dan keterampilan tenaga kerja peserta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Strategi ini mencakup pelatihan, bimbingan, dukungan peralatan, dan bantuan pemasaran, yang dimaksudkan untuk membantu peserta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meningkatkan standar produk, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun online.

Hasil pengolahan data dari wawancara pelaku UMKM menunjukkan adanya variasi pengalaman dalam mengakses program Dinas:

1. Pelaku UMKM yang mengikuti program Dinas
  - a. Ibu Elfida (Wirda Cake) dan Tukang Taylor telah mengikuti program Dinas secara langsung.
  - b. Dampak yang dirasakan meliputi peningkatan profesionalitas usaha, struktur manajemen lebih rapi, efisiensi produksi melalui bantuan peralatan, peningkatan keterampilan manajemen usaha, dan kemampuan promosi melalui media sosial maupun komunitas UMKM.
  - c. Hambatan yang dialami mencakup keterbatasan SDM, waktu untuk mengikuti pelatihan karena padatnya pesanan, dan adaptasi awal terhadap pemasaran digital.
  - d. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui pengaturan jadwal kerja, pembagian tugas, pemanfaatan bantuan peralatan, dan pembelajaran pemasaran digital secara berkelanjutan.
2. Pelaku UMKM yang belum mengikuti program dinas
  - a. Pabrik Tahu Ateuk Deah Tanoh dan Rumah Bitata Nasi Minyak dan

Nasi Soto hanya mengetahui program secara umum melalui teman, tetangga, atau media sosial.

- b. Semua pengembangan usaha dilakukan secara mandiri, termasuk peningkatan kualitas produk, pengemasan, manajemen usaha, dan pemasaran.
- c. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, SDM, dan akses pemasaran yang terbatas. Dukungan formal dari Dinas maupun pemerintah belum diterima, sehingga perkembangan usaha sangat bergantung pada pengalaman pribadi, loyalitas pelanggan, dukungan keluarga, dan informasi dari sesama pelaku UMKM.
- d. Strategi mengatasi hambatan dilakukan dengan pengelolaan keuangan mandiri, memaksimalkan promosi sederhana melalui pelanggan tetap dan media sosial, serta belajar dari pengalaman sendiri maupun pelaku UMKM lain.

Dari sisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh, hambatan internal mencakup keterbatasan modal pelaku UMKM dan kualitas SDM yang belum optimal. Hambatan eksternal termasuk sistem pembiayaan yang belum sepenuhnya fleksibel dan kondisi Aceh yang rawan bencana. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas melakukan sinergi dengan stakeholder, memperkuat pendampingan UMKM, dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi yang berkembang. Evaluasi strategi dilakukan melalui monitoring kegiatan, laporan pelaksanaan program, dan penilaian perkembangan kapasitas UMKM secara berkala. Hasil evaluasi

digunakan untuk menyempurnakan strategi agar lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan pengolahan data, strategi pengembangan UMKM oleh Dinas efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha, kualitas SDM, profesionalitas, dan kemampuan promosi bagi UMKM yang mengikuti program secara langsung. Hambatan internal (modal, SDM, kesiapan pelaku UMKM) dan eksternal (akses program, kondisi Aceh) memengaruhi efektivitas implementasi strategi. Pelaku UMKM yang belum mengikuti program melakukan pengembangan usaha secara mandiri, sehingga progresnya lebih lambat dibanding UMKM binaan Dinas. Bantuan yang diberikan oleh layanan melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan peralatan telah terbukti menjadi elemen penting dalam meningkatkan potensi bisnis dan daya saing UMKM. Secara keseluruhan, pengolahan data menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM oleh Dinas memberikan dampak positif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi aktif pelaku UMKM, ketersediaan SDM, modal, dan akses ke program.

#### 4.1.4 Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta para pelaku UMKM, analisis data dilakukan dengan mengacu pada indikator strategi menurut Geoff Mulgan, yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arah (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Kelima indikator ini digunakan sebagai kerangka untuk melihat kesesuaian antara perencanaan strategi dan implementasinya di lapangan dalam pengembangan UMKM.

a. Tujuan (*purpose*)

Pada aspek tujuan, strategi pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh menunjukkan kesesuaian dengan teori Mulgan, yaitu sebagai dasar arah kebijakan yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor usaha kecil. Tujuan tersebut tidak hanya menekankan aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaku UMKM lebih mandiri dan berdaya saing. Namun dalam implementasinya, ditemukan adanya ketidakseimbangan manfaat, di mana tidak semua pelaku UMKM memperoleh dampak secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis tujuan sudah tepat, tetapi secara empiris masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan hasil yang dirasakan di lapangan.

b. Lingkungan (*environment*)

Pada aspek lingkungan, sesuai dengan konsep Mulgan yang menekankan pentingnya faktor eksternal dan internal dalam strategi, ditemukan bahwa implementasi kebijakan UMKM di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural. Hambatan internal meliputi keterbatasan modal, kualitas SDM yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas manajerial pelaku usaha. Sementara itu, hambatan eksternal berupa kondisi wilayah yang rawan bencana serta belum optimalnya distribusi informasi program. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan strategis belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif, sehingga memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi strategi secara

keseluruhan.

c. Arah (*direction*)

Pada aspek arah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah memiliki arah kebijakan yang cukup jelas dan terstruktur, sesuai dengan prinsip Mulgan bahwa strategi harus memberikan orientasi yang tegas dalam pelaksanaan kebijakan. Arah tersebut diwujudkan melalui program pelatihan, pendampingan usaha, pengembangan produk, dan kerja sama lintas sektor. Fokus utama arah kebijakan adalah peningkatan kualitas dan daya saing UMKM, bukan hanya peningkatan jumlah usaha. Namun demikian, arah kebijakan ini belum sepenuhnya terimplementasi secara merata, sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum tersentuh program secara optimal.

d. Tindakan (*action*)

Pada aspek tindakan, sesuai dengan indikator Mulgan, implementasi strategi merupakan tahap paling penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah melaksanakan berbagai program nyata seperti pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, dan dukungan pemasaran. Program tersebut memberikan dampak positif bagi sebagian pelaku UMKM, terutama dalam peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi usaha. Namun, terdapat kesenjangan implementasi yang cukup signifikan, di mana sebagian pelaku UMKM belum memperoleh akses terhadap program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kebijakan belum sepenuhnya bersifat inklusif dan merata.

e. Pembelajaran (*learning*)

Pada aspek pembelajaran, sesuai dengan teori Mulgan, evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah melakukan evaluasi melalui monitoring, laporan program, dan penilaian perkembangan UMKM. Namun, proses pembelajaran ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan yang dirasakan langsung oleh seluruh pelaku UMKM. Kurangnya pendampingan lanjutan serta belum meratanya tindak lanjut program menunjukkan bahwa mekanisme pembelajaran kebijakan masih perlu diperkuat agar lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan kerangka teori Geoff Mulgan, terutama pada aspek tujuan, arah, dan tindakan yang sudah dirumuskan dengan cukup baik. Namun demikian, pada aspek lingkungan, tindakan, dan pembelajaran masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi strategi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, ketidakmerataan akses program, serta kurang optimalnya pendampingan dan evaluasi lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antar indikator strategi agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam praktiknya.

#### 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data

yang telah dilakukan, pembahasan penelitian ini difokuskan pada strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pembahasan ini mengacu pada indikator strategi menurut Geoff Mulgan, yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arah (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*).<sup>59</sup>

Pada aspek tujuan (*purpose*), hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dirumuskan oleh Dinas telah selaras dengan visi pembangunan daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Hal ini sejalan dengan konsep strategi yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan. Tujuan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa Dinas telah mengadopsi pendekatan pengembangan yang bersifat berkelanjutan. Dari sisi pelaku UMKM, tujuan ini dinilai relevan karena mampu meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan manajemen usaha, meskipun belum semua pelaku merasakan manfaat secara merata.<sup>60</sup>

Pada aspek lingkungan (*environment*), temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal seperti keterbatasan modal dan kualitas SDM menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan usaha.

---

<sup>59</sup> Mulgan, G, *The Art Of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good*. Inggris: Oxford University Press, 2009. Hal 19.

<sup>60</sup> Husein Umar, *Strategic Management in Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 16.

Sementara itu, hambatan eksternal seperti kondisi daerah yang rawan bencana serta keterbatasan akses informasi dan program menunjukkan bahwa lingkungan strategi belum sepenuhnya kondusif. Dalam teori strategi, lingkungan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi dan peningkatan akses informasi agar seluruh pelaku UMKM dapat berpartisipasi secara optimal.

Pada aspek arah (*direction*), strategi yang diterapkan oleh Dinas sudah menunjukkan kejelasan dan konsistensi melalui berbagai program seperti pelatihan, pendampingan, pengembangan produk, dan kerja sama dengan mitra. Arah kebijakan yang menekankan pada peningkatan kualitas dan daya saing produk menunjukkan bahwa Dinas tidak hanya berfokus pada kuantitas UMKM, tetapi juga kualitasnya. Hal ini sesuai dengan konsep pengembangan UMKM modern yang menekankan pentingnya daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.<sup>61</sup>

Selanjutnya pada aspek tindakan (*action*), implementasi strategi telah dilakukan melalui berbagai program nyata yang memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, khususnya yang terlibat langsung dalam program Dinas. Pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, serta dukungan pemasaran terbukti mampu meningkatkan kapasitas usaha dan efisiensi operasional.<sup>62</sup> Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi strategi belum merata, sehingga masih terdapat pelaku UMKM yang belum mendapatkan manfaat secara

---

<sup>61</sup> Hartono, Jogianto. *Strategi Penelitian Bisnis*. (BPFE: Yogyakarta. 2018), hlm. 29.

<sup>62</sup> Fred R. David dan Forest R. David, *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*, 18th ed. (Harlow: Pearson Education, 2023), hlm. 5.

langsung. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan yang perlu diperbaiki agar program dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM.

Pada aspek pembelajaran (*learning*), Dinas telah melakukan evaluasi melalui monitoring dan pelaporan program secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas strategi melalui proses pembelajaran organisasi. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pendampingan lanjutan dan tindak lanjut program, sehingga pelaku UMKM belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, belum meratanya akses program juga memengaruhi proses evaluasi secara menyeluruh.<sup>63</sup> Oleh karena itu, pembelajaran strategi perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, pembahasan juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pelaku UMKM yang mengikuti program Dinas dan yang tidak. UMKM binaan cenderung mengalami peningkatan kapasitas usaha, profesionalitas, serta kemampuan promosi dan pemasaran. Sementara itu, UMKM yang tidak terlibat dalam program harus mengembangkan usaha secara mandiri dengan berbagai keterbatasan, sehingga perkembangan usaha cenderung lebih lambat. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam program menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan strategi pengembangan UMKM.<sup>64</sup>

Strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi,

---

<sup>63</sup> Hartono, Jogianto. *Strategi Penelitian Bisnis*. (BPFE: Yogyakarta. 2018), hlm. 29.

<sup>64</sup> David Sukardi Kodrat, *Manajemen Strategi Membangun Keunggulan Bersaing Era Global di Indonesia Berbasis Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 13.

Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif, terutama bagi pelaku usaha yang terlibat langsung. Namun, efektivitas strategi masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, serta belum meratanya akses program. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan pemerataan akses, penguatan pendampingan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar strategi yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi seluruh pelaku UMKM.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Strategi pengembangan UMKM telah dilaksanakan berdasarkan lima indikator strategi menurut Geoff Mulgan, yaitu tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arah (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Secara umum, strategi sudah berjalan cukup baik, terutama pada aspek tujuan, arah, dan tindakan yang telah dirancang melalui program pelatihan, pendampingan, pengembangan produk, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Strategi ini juga telah selaras dengan visi pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala pada aspek lingkungan, pemerataan tindakan, serta pembelajaran yang belum optimal.

2. Hambatan dalam implementasi strategi pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh

Hambatan utama yang dihadapi meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta keterbatasan tenaga kerja pelaku

UMKM. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi daerah yang rawan bencana serta belum meratanya akses informasi dan program dari Dinas kepada seluruh pelaku UMKM. Selain itu, terdapat kesenjangan implementasi di lapangan, di mana sebagian UMKM belum memperoleh manfaat langsung dari program yang dijalankan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas strategi pengembangan UMKM secara menyeluruh.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang disebutkan sebelumnya, peneliti menawarkan rekomendasi berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh

Memperkuat alokasi anggaran khusus untuk pengembangan UMKM, sehingga program pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, dan akses permodalan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha secara merata. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi terkait pendampingan usaha, dengan menekankan pada keberlanjutan program (*sustainable mentoring*), bukan hanya pelatihan jangka pendek. Regulasi yang lebih jelas dan terstruktur juga diperlukan agar setiap pelaku UMKM memperoleh pendampingan yang berkelanjutan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan usaha di lapangan.

### 2. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh

a. Meningkatkan akses program bagi UMKM non-binaan agar dampak

program dapat dirasakan lebih merata.

- b. Memperkuat pendampingan dan pelatihan, terutama terkait pemasaran digital, manajemen usaha, dan inovasi produk.
- c. Meningkatkan fleksibilitas sistem pembiayaan dan menyediakan dukungan modal bagi UMKM agar dapat mengatasi keterbatasan internal.
- d. Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti lembaga perbankan, komunitas UMKM, dan institusi pendidikan, untuk memperluas jangkauan program dan kapasitas pelaku UMKM.

### 3. Bagi Pelaku UMKM

- a. Mengikuti program Dinas secara aktif untuk memaksimalkan manfaat dari pelatihan, pendampingan, dan bantuan fasilitas.
- b. Mengoptimalkan penerapan teknologi digital dalam pemasaran dan manajemen usaha untuk meningkatkan daya saing.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan diversifikasi usaha untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

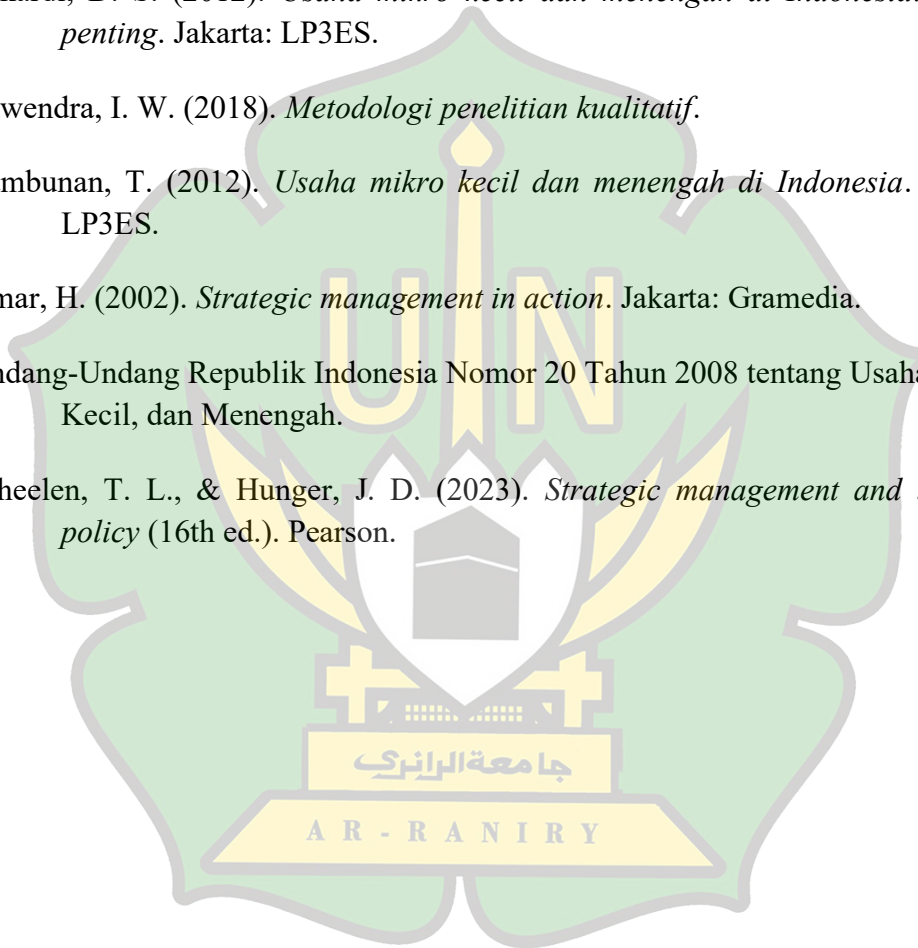
- a. Disarankan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi jangka panjang dampak strategi pengembangan UMKM, termasuk UMKM non-binaan.
- b. Penelitian dapat memperluas objek penelitian ke sektor UMKM lain seperti kerajinan atau jasa untuk melihat perbandingan strategi pengembangan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, F. (2011). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alyas, & Rakib, M. (2017). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penguatan ekonomi kerakyatan. *Sosiohumaniora*, 19(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12249>
- Ananda, A. D. (2019). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis industri kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah*, 10(10).
- Anoraga, P., & Sudantoko, D. (2018). *Koperasi, kewirausahaan dan usaha kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Y. A. (2016). *Pemahaman strategi bisnis dan kewirausahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh. (2022). *Laporan pengawasan makanan siap saji di wilayah Banda Aceh*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Data UMKM menurut sektor usaha Kota Banda Aceh*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Usaha mikro kecil*. <https://bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>
- Dani. (2018, Mei). UMKM bisa gerakkan ekonomi Indonesia, ini syaratnya. Okezone Economy. <http://economy.okezone.com/read/2018/05/01/umkm-bisa-gerakkan-ekonomi-indonesia-ini-syaratnya>
- David, F. R. (2023). *Strategic management: Concepts and cases*. Pearson.
- Pemerintah Aceh. (2016). *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Aceh*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh.
- Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. (2022). *Data inspeksi sanitasi produksi makanan UMKM*.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh. (2023). *Laporan program pemberdayaan UMKM sektor makanan*.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

- (2023). *Rekap izin usaha mikro dan sertifikasi halal pedagang makanan*.
- Fadhlan, M., & Zulfikar, R. (2021). Digitalisasi UMKM kuliner pasca pandemi di Banda Aceh. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 6(1).
- Gunawan, I. (2015). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan. (2019). Efektivitas pengembangan usaha kecil dan menengah dalam pandangan hukum syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Hidayati, S. (2022). Efektivitas pelatihan UMKM oleh dinas terkait. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(1).
- Ismail, S. (2012). *Manajemen strategik*. Bandung: Erlangga.
- Jogianto, H. (2018). *Strategi penelitian bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Kodrat, D. S. (2009). *Manajemen strategi: Membangun keunggulan bersaing era global di Indonesia berbasis kewirausahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lexy, J. M. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2017). Pertumbuhan UMKM dan koperasi di Banda Aceh sangat signifikan. <http://bandaacehkota.go.id/berita/949/pertumbuhan-umkm-dan-koperasi-di-banda-aceh-sangat-signifikan.html>
- Rahmawati, D. (2021). Inovasi produk kuliner tradisional sebagai strategi daya saing UMKM. *Jurnal Kuliner Nusantara*, 4(2).
- Rosyida. (n.d.). Pengertian UMKM: Kriteria, aturan, peran dan contoh. <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>
- Siagian, S. P. (2000). *Manajemen strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (2019). *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 6(1).
- Sukardi, D. K. (2008). *Pengantar pelaksanaan program BK di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, D. S. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Umar, H. (2002). *Strategic management in action*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2023). *Strategic management and business policy* (16th ed.). Pearson.



### Lampiran Dokumentasi









**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 523/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2025**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **19 Februari 2025**
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:  
**Muhamad Thalal, Lc., M. SI., M. Ed.**  
 Untuk membimbing skripsi:
- Nama : **Aninda Ulfritia**  
 NIM : 210802065  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 04 Maret 2025  
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-3171/Un.08/FISIP.I.05/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, 2. Penjual yang masuk umkm (pelaku umkm)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210802065  
Nama : ANINDA ULFITRIA  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Jln. Utama III Komplek Perumahan PNS Kutaraja Biluy Resort Monraya Payaroh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Banda Aceh, 24 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 31 Maret 2026

AR - R A N I R Y



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
*Jl. Soekarno Hatta KM. 2 No. 1 Telp. 0651(7429596). Fax, 0651(46646)*  
*Mibo - Banda Aceh*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 518 / 36 / 2026

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Aninda Ulfitria / 210802065  
 Judul Penelitian : Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Telah selesai melakukan konsultasi/wawancara sekaligus perolehan data untuk mengetahui Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Melalui Pengumpulan data dan wawancara dalam rangka untuk penyelesaian penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 09 Januari 2026

a.n. Kepala Dinas  
 Koperasi Usaha Kecil Menengah dan  
 Perdagangan Kota Banda Aceh,  
 Kepala Bidang PUM

